

Perkuat Perlindungan Sosial, Wali Kota Kupang Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank NTT terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat kecil.

Hal ini diwujudkan melalui penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan dan buku rekening Bank NTT kepada 12 pekerja rentan dari enam kecamatan di Kota Kupang, Rabu (3/9/2025).

Program ini merupakan bagian dari Bangun NTT, yang memberi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian khususnya bagi masyarakat kategori desil 1 dan 2.

Selain penyerahan kartu dan rekening, juga diserahkan santunan duka kepada keluarga almarhum Duli dan almarhum Moses Kadji, penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini bukan hanya pemberian santunan, tetapi simbol bahwa negara hadir saat masyarakat membutuhkan. Pemerintah provinsi hadir, pemerintah kota hadir, semua elemen hadir bersama masyarakat. Kalau ingin cepat, kita berjalan sendiri. Kalau ingin jauh, kita berjalan bersama-sama. Inilah makna kebersamaan yang kita wujudkan hari ini,” ujar Christian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung, terutama DPRD Provinsi NTT, Dinas Nakertrans, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank NTT.

“Otoritas bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Terima kasih kepada semua pihak yang terus menjaga harapan dan menghadirkan solusi di tengah keterbatasan. Dengan kebersamaan, kita yakin dapat mengatasi setiap tantangan,” tambahnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT, Wawan Burhanuddin, turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah.

“Program ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi rakyat. Dengan dukungan Gubernur dan Wali Kota, masyarakat kini terlindungi melalui jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kebijakan ini benar-benar pro rakyat,” katanya.

Acara ini juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi NTT Muhammad Ansor dan Filmon Loasana, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Silvia M. Pekujawang, Direktur Dana dan Treasury Bank NTT Hilarius Minggu, serta para camat dan lurah.

Adapun penerima simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan dan rekening Bank NTT antara lain Jonathan Agustinus Tali, Juneidi Alimi, Onanda Laurina Koby, Doris Masang Nenu, Susilowati, Muhamad Yunus, Cornelis Pulangga, Jitron Arisamak Taklale, Agustinus Tana, dan Apriana Tanaale.

Melalui Bangun NTT, pemerintah berharap semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi, sehingga dapat hidup lebih aman, memiliki kepastian, dan menuju kesejahteraan yang lebih baik. ***

Wagub NTT: Deklarasi Damai FPK NTT Wujud Persatuan di Tengah Perbedaan

Kupang, nwartapedia.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Deklarasi Damai yang digelar Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) NTT bersama 38 paguyuban etnis di halaman Kantor Gubernur NTT, Rabu (3/9/2025).

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan apresiasi atas deklarasi ini. Walaupun kita berbeda etnis, suku, dan agama, kita memiliki tujuan yang sama membangun NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Tanpa suasana yang aman dan damai, pembangunan tidak akan berjalan,” ungkap Johni Asadoma.

Wagub juga menilai keberadaan FPK sebagai wadah yang sangat strategis untuk memperkuat kebersamaan.



Dengan bergabungnya 38 paguyuban etnis, forum ini diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan

masyarakat, mulai dari keamanan, pendidikan, hingga kemiskinan.

“Deklarasi ini menjadi momentum penting untuk terus melakukan kegiatan positif dan produktif demi kemajuan daerah. Kekompakan ini adalah modal besar bagi pembangunan NTT,” tambahnya.



Ketua FPK NTT, Ir. Theodorus Widodo, yang akrab disapa Theo Widodo dalam keterangannya menyebutkan bahwa deklarasi damai dilakukan sebagai respons atas dinamika situasi nasional belakangan ini.

“Setelah melalui diskusi bersama, kami di FPK NTT bersepakat menggelar deklarasi damai bersama 38 etnis. Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana aman dan damai, baik di Indonesia maupun di NTT,” jelas Theo Widodo.

Deklarasi yang dibacakan Ketua FPK menekankan lima komitmen utama yakni menghargai aspirasi dengan tujuan mulia, menyampaikan aspirasi secara santun, menjaga harmoni, menolak tindakan anarkis, serta memperkuat persatuan demi kelanjutan pembangunan bangsa.

Acara ditutup dengan doa bersama lintas agama dan penampilan puisi dari perwakilan paguyuban etnis.

Doa pembukaan dipimpin Kiai Pono dari etnis Jawa, doa penutup oleh Pendeta Thomas Eli Marsudi, serta puisi dibawakan oleh Nunu Nurdiana dari etnis Sulawesi Selatan.
(MI)